

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang melibatkan peningkatan kapasitas produktif suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). UMK memainkan peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong inovasi serta kewirausahaan. Selain itu, UMK juga berperan sebagai penopang perekonomian lokal, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, dan meningkatkan distribusi pendapatan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan akses terhadap sumber daya, UMK dapat menjadi katalisator utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Jannah, 2020). Usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah (Halim, 2020). Menurut Noorman (2018) yang dimaksud dengan usaha mikro dan kecil (UMK) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Menurut Nurataman (2021) UMK memainkan peran penting dalam perekonomian karena mereka sering menjadi sumber utama lapangan kerja, kontributor pendapatan, dan agen penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

UMK memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan jumlah yang mencapai sekitar 64,2 juta unit, UMK merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dimana mereka berkontribusi hingga 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMK juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, menunjukkan peran penting mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lebih dari 90% perusahaan di Indonesia tergolong sebagai UMK, dan kontribusi mereka terhadap investasi mencapai 60,4% dari

total investasi, menjadikan UMK sebagai pilar utama dalam memperkuat stabilitas dan pemerataan ekonomi di Indonesia (Novitasari, 2022). Meskipun UMK sering kali memiliki potensi untuk berkembang pesat, terutama di era digital saat ini, namun seringkali mereka menghadapi kendala seperti akses terbatas terhadap modal, infrastruktur yang kurang mendukung, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis (Adda, 2023). Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung, program bantuan, serta infrastruktur yang memadai, UMK mungkin kesulitan untuk mencapai potensi penuhnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Sunrawali, 2022).

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada manajemen strategis, yang menurut literatur publik menekankan bahwa organisasi perlu melakukan perencanaan strategis, pengambilan keputusan terpadu, dan alokasi sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan jangka panjang (Axelsson, 2024). Dalam konteks pengembangan UMK, teori ini relevan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah merancang dan melaksanakan strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku usaha.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengembangkan potensi UMK di setiap lini. Pemerintah perlu menyediakan lingkungan regulasi yang kondusif, dengan mengurangi birokrasi berlebihan dan menyederhanakan proses perizinan usaha. Pemerintah, dalam hal ini, dapat berperan sebagai penyedia informasi dan fasilitator antara UMK dengan sumber daya yang tersedia, serta memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMK lokal. Selain itu, pemerintah dapat menggalang kerjasama antara UMK dengan pihak swasta atau lembaga non-profit untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran. Dengan peran aktif dari pemerintah di setiap tingkatan, termasuk pemerintah, potensi UMK untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dapat lebih maksimal dimanfaatkan (Prathama, 2022).

Peran pemerintah dalam pengembangan UMK tak hanya terbatas pada regulasi, tapi juga pada fasilitatis permodalan. Berdasarkan penelitian Sukmawati (2022) alokasi anggaran yang optimal dan program yang tepat sasaran memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ketika anggaran dialokasikan secara efisien untuk kebutuhan mendesak UMK, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta pemasaran digital, UMK mampu meningkatkan daya saing dan produktivitasnya. Program-program yang dirancang khusus untuk mendukung inovasi, memberikan kemudahan akses teknologi, dan membuka peluang pasar baru, dapat mendorong UMK berkembang lebih pesat. Dengan demikian, kombinasi alokasi anggaran yang bijak dan program yang relevan dapat memperkuat fondasi UMK sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Meskipun Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, hanya 57,6% dari UMK yang memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun UMK memiliki banyak kelebihan dan potensi, mereka masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing produk lokal yang masih relatif rendah (Barr, 2019). Berdasarkan penelitian Corina (2024) salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikasi halal dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, biaya dan proses yang terkait dengan penerapan sertifikasi halal juga menjadi hambatan, terutama bagi UMK dengan sumber daya terbatas. Faktor-faktor seperti kompleksitas administrasi, biaya sertifikasi, dan kekhawatiran akan peningkatan biaya produksi juga dapat mempengaruhi sikap dan kesiapan pelaku UMK untuk mengadopsi sertifikasi halal.

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan pemerataan pembangunan di sektor industri di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 0,38 persen (BPS Provinsi Jambi, 2024). Sektor industri menjadi tumpuan bagi perekonomian Jambi, terutama karena UMK mampu bertahan lebih baik dibandingkan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. UMK di Provinsi Jambi meningkat.

Tabel 1.1
Jumlah UMK di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah
2019	137.309
2020	72.126
2021	165.497
2022	184.042
2023	176.051

Sumber: BPS Provinsi Jambi (2024)

Perkembangan jumlah UMK di Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 137.309 UMK yang terdaftar. Namun, pada tahun 2020, jumlah ini menurun drastis menjadi 72.126 UMK, akibat dampak pandemi COVID-19 yang memukul sektor usaha kecil dan menengah. Pada tahun berikutnya, jumlah UMK mengalami lonjakan signifikan menjadi 165.497, mencerminkan pemulihan ekonomi dan adaptasi UMK terhadap kondisi baru. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan 184.042 UMK, tetapi sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 176.051 UMK (BPS Provinsi Jambi, 2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMK antara lain adalah permodalan. Permodalan menjadi faktor utama dalam perkembangan UMK karena ketersediaan modal yang cukup memungkinkan UMK untuk membiayai operasional usaha, mengembangkan produk, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya membantu meningkatkan daya saing di pasar. Pengembangan UMK diharapkan meningkatkan stabilitas ekonomi karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, yang membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Data jumlah UMK di Kabupaten Batanghari merupakan bagian dari Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah UMK di Kabupaten Batanghari

Tahun	Jumlah
2021	12.771
2022	17.584
2023	17.584

Sumber: BPS Kabupaten Batanghari (2024)

Pertumbuhan UMK di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan yang sangat sedikit dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah UMK tercatat sebanyak 12.771, dan mengalami peningkatan menjadi 17.584 pada tahun

2022. Jumlah ini tetap sama pada tahun 2023, menunjukkan stagnasi dalam pertumbuhan. Meskipun demikian, pertumbuhan ini masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan UMK di wilayah lainnya, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendukung dan mengembangkan sektor UMK di Kabupaten Batanghari (BPS Kabupaten Batanghari, 2024).

Tabel 1.3
Jumlah Klasifikasi UMK di Kabupaten Batanghari 2023

Jenis	Jumlah	Perdagangan	Jasa	Omset < 100 Juta	Omset > 100 Juta
Mikro	17.466	10.056	7.400	16.579	887
Kecil	138	85	53	112	26

Sumber: BPS Kabupaten Batanghari (2024)

Data untuk Kabupaten Batanghari tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah UMK (Usaha Mikro dan Kecil) didominasi oleh usaha mikro, dengan total 17.466 unit, di mana 10.056 terlibat dalam perdagangan dan 7.400 dalam jasa. Sebagian besar usaha mikro memiliki omset kurang dari 100 juta, yaitu 16.579 unit, sementara hanya 887 unit yang memiliki omset lebih dari 100 juta. Di sisi lain, usaha kecil berjumlah 138 unit, dengan 85 di antaranya bergerak dalam perdagangan dan 53 dalam jasa. Dari usaha kecil tersebut, 112 unit memiliki omset kurang dari 100 juta, sedangkan 26 unit memiliki omset lebih dari 100 juta. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar UMK di Kabupaten Batanghari adalah usaha mikro dengan omset yang relatif rendah (BPS Kabupaten Batanghari, 2024).

Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan strategi untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi hambatan-hambatan praktis, dan memberikan dukungan kepada pelaku UMK di Batanghari. Sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan program bantuan permodalan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp2.475.000.000. Permasalahan utama dalam pengembangan UKM di Kabupaten Batanghari terletak pada keterbatasan permodalan dan lambatnya perkembangan kewirausahaan. UKM di daerah ini masih bergantung pada program kredit tanpa angsuran dari pemerintah, yang menunjukkan bahwa akses

ke permodalan mandiri atau komersial masih minim. Selain itu, kewirausahaan dalam pengembangan bisnis UKM belum berkembang pesat. Struktur kelembagaan UKM yang mayoritas berbentuk perorangan dan berlandaskan hubungan kekeluargaan juga menjadi penghambat, karena respons yang cenderung lamban terhadap perubahan pasar atau dinamika bisnis. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jambi, permasalahan ini terus menjadi tantangan dalam mendorong kemandirian dan daya saing UKM di Kabupaten Batanghari.

Hingga tahun 2020, realisasi penyaluran dana UMK mencapai Rp4.090.000.000 kepada 1.317 UMK, dengan tingkat pengembalian dana hingga Desember 2020 sebesar Rp2.940.019.500. Pada tahun 2021, Pemkab Batang Hari memiliki 445 unit Koperasi Unit Desa (KUD), di mana 160 unit di antaranya aktif dan terlibat dalam berbagai jenis usaha yang tersebar di 8 kecamatan. Selain itu, untuk mengatasi masalah yang dihadapi UMK di Kabupaten Batang Hari, Pemkab Batang Hari menawarkan solusi dengan memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital. Pelaku UMK dapat dengan mudah memasarkan produknya melalui media sosial seperti WhatsApp, WhatsApp Bisnis, Facebook, Instagram, serta *platform e-commerce* seperti TikTok, Shopee, dan YouTube. Penjualan produk melalui media sosial atau e-commerce ini dianggap sangat efektif untuk menjangkau pelanggan, menghemat waktu, dan mengurangi biaya operasional tanpa perlu memiliki toko fisik.

Selain memanfaatkan media sosial, Pemkab Batang Hari juga memberikan perhatian penuh kepada pelaku UMK dengan menyediakan pusat oleh-oleh sebagai wadah untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produk UMK, terutama produk andalan dari Kabupaten Batang Hari. Dari 17.604 UMK, dana ini disalurkan kepada 1.317 atau sekitar 16% UMK yang bergerak di bidang kerajinan, khususnya produk makanan ringan dan kerajinan yang dihasilkan oleh industri rumahan. Dampaknya terlihat pada peningkatan ketersediaan produk lokal di pusat oleh-oleh, yang tidak hanya memperkaya variasi produk yang ditawarkan tetapi juga memperkuat daya tarik Batang Hari sebagai destinasi wisata. Hal ini memberikan peluang bagi pusat oleh-oleh untuk menarik lebih banyak

pengunjung, meningkatkan penjualan, dan mempromosikan produk khas daerah kepada wisatawan yang datang.

Saat ini, Pemkab Batang Hari sedang melakukan seleksi untuk menentukan produk yang layak dipajang di pusat oleh-oleh berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki izin usaha, sertifikat halal untuk produk kuliner, kemasan yang menarik, dan ciri khas tersendiri. Semua jenis produk, tidak hanya kuliner tetapi juga minuman dan kerajinan, dapat dipasarkan di pusat oleh-oleh tersebut. Meskipun berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang industri, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat perkembangan lebih lanjut di Kabupaten Batang Hari. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses terhadap permodalan yang berkelanjutan, meskipun telah ada program bantuan permodalan sejak tahun 2016. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses pasar bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi tantangan tersendiri, sehingga produk yang dihasilkan sulit untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen dan pemasaran juga mengakibatkan banyak pelaku UKM yang belum mampu mengoptimalkan potensi bisnis mereka. Terakhir, tingkat pengembalian dana yang belum optimal menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir tersebut secara efektif.

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan industri besar, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengembangkan strategi penguatan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Batang Hari, UMK berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, dan lemahnya inovasi produk. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang terarah dan berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memperkuat daya saing UMK, tidak hanya melalui kebijakan bantuan dana, tetapi juga pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi pemasaran dan legalitas usaha.

Dari perspektif model pengembangan, penelitian ini berangkat dari pendekatan manajemen strategis yang menekankan pentingnya koordinasi antaraktor dalam pengembangan UMK. Model ini dapat dianalisis melalui kerangka Miles & Huberman atau pendekatan kolaboratif seperti *stakeholder-based development*, yang melihat penguatan UMK sebagai hasil interaksi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan model tersebut, peneliti berupaya mengidentifikasi pola dan bentuk implementasi strategi pengembangan yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Hari, sekaligus menelaah hambatan internal dan eksternal yang menghambat efektivitasnya.

Secara urgensi, penelitian ini penting karena Kabupaten Batang Hari masih menghadapi stagnasi pertumbuhan UMK dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Kabupaten Batang Hari (2024), jumlah UMK dari tahun 2022 hingga 2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yakni tetap di angka 17.584 unit. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar pada efektivitas strategi pengembangan yang diterapkan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Fenomena tersebut menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan berbasis data dan pengalaman empiris di lapangan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini diarahkan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana strategi pengembangan UMK dijalankan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Hari, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan fenomena secara faktual, tetapi juga menafsirkan makna di balik kebijakan, tindakan, dan pengalaman para pelaku UMK dalam proses pengembangan tersebut. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing UMK secara berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten

Batanghari dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali strategi, pola implementasi, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan UMK. Dengan menganalisis model pengembangan UMK berbasis kolaborasi dan pemberdayaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan serta menemukan alternatif strategi yang lebih berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengembangkan potensi UMK?
2. Apa saja faktor penghambat pengembangan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Batanghari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengembangkan potensi UMK.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengembangan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Batanghari.

1.4 Manfaat Penelitian

Besar harapan Penulis, penelitian ini memberikan berbagai manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan dengan memperkaya literatur mengenai strategi pengembangan UMK di tingkat daerah. Studi ini juga membantu

mengidentifikasi kebijakan efektif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMK. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan model strategi yang berkelanjutan untuk peningkatan daya saing UMK di berbagai wilayah.

- b. Bagi akademik. Penelitian ini memberikan wawasan akademik mengenai strategi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh pemerintah daerah, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam studi kebijakan publik dan ekonomi regional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis. Penulis dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengoptimalkan potensi UMK.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Batanghari. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait strategi pengembangan UMK kedepannya

